

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebijakan publik dapat diketahui sebagai rangkaian rencana, aktivitas, sikap, program yang akan diambil maupun tidak diambil oleh para pemangku kepentingan guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kebijakan publik diusahakan menjadi suatu respon dari pihak pemerintah untuk menciptakan harmoni pada kehidupan masyarakat menuju pada arah yang lebih baik. Dengan adanya kebijakan publik diharapkan akan menjadi solusi bagi masalah-masalah publik, yang mana masalah tersebut memiliki dampak besar dan dirasakan di dalam kehidupan masyarakat luas. Dengan itu, kebijakan publik menjadi suatu upaya untuk meraih tujuan-tujuan tertentu, sekaligus menjadi upaya penyelesaian masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu (Ramadhani & Muhammad, 2017). Banyak hal-hal yang sebenarnya dapat diselesaikan oleh pemerintah melalui kebijakan publik, salah satunya terkait dengan pembangunan infrastruktur.

Kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah merupakan suatu keputusan-keputusan yang penting karena pada pelaksanaannya akan mengikat untuk kehidupan masyarakat luas. Kebijakan publik secara lebih lanjut dapat dianggap sebagai suatu bentuk pelayanan publik yang dijalankan oleh negara guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satunya melalui kebijakan pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di Indonesia sendiri masih menjadi isu yang hangat untuk dibahas

bersama yang mana karena masalah pembangunan di Indonesia belum mencapai pemerataan. Tidak jarang terjadi suatu ketimpangan antara satu daerah dengan daerah lain dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Sehingga tak jarang terjadi kecemburuan antar daerah karena menilai pembangunan infrastruktur di daerahnya tidak sebaik dan semasif dengan apa yang dilakukan di daerah lain. Banyak pihak yang beranggapan bahwa selama ini pembangunan hanya berorientasi dan bersifat jawasentris, akan tetapi pada faktanya terkadang masih ada daerah-daerah di Pulau Jawa yang belum juga tersentuh oleh pembangunan infrastruktur mendasar.

Tentunya pemerintah daerah menginginkan adanya kemajuan pembangunan di daerahnya. Pemerintah Kabupaten Kendal saat ini sedang gencar untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur kepada daerah-daerah yang masih memiliki kendala ketertinggalan infrastruktur, salah satunya yaitu infrastruktur jalan. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten, pemerintah daerah berupaya untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan infrastruktur jalan yang belum terbangun dengan baik di beberapa daerah di Kabupaten Kendal. Pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal tahun 2021-2026. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu hal yang esensial dan vital untuk melancarkan keberjalanan proses pembangunan nasional ataupun regional (Sumadiasa, Tisnawati, & Wirathi, 2016). Pembangunan infrastruktur yang ada di suatu daerah akan membantu daerah untuk dapat tumbuh. Hal ini dikarenakan melalui pembangunan infrastruktur akan punya pengaruh yang penting kepada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, peningkatan kemakmuran dan terwujudnya stabilitas makro ekonomi (Haris, 2009). Dengan itu pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tinggal di suatu daerah tertentu akan menjadi lebih lancar apabila infrastruktur dibangun dengan baik.

Pembangunan infrastruktur jalan menjadi suatu hal yang sangat esensial dan perlu dilakukan untuk mendukung proses tumbuhnya ekonomi di suatu daerah. Melalui optimalisasi pembangunan infrastruktur jalan akan membantu kehidupan masyarakat dalam aktivitas perekonomian sehari-hari. Laju pertumbuhan ekonomi serta investasi di suatu daerah tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Melalui pembangunan infrastruktur yang maksimal akan mendukung efisiensi, melancarkan proses mobilisasi barang dan jasa, serta menaikkan nilai tambah dalam perekonomian (Prasetyo & Firdaus, 2009). Dengan itu dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur sebagai kunci penting dalam proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di suatu daerah. Daerah yang mempunyai akses infrastruktur jalan yang baik juga akan mendukung keberjalanan interaksi antar wilayah yang

mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan barang atau jasa yang belum tersedia di suatu wilayah. Hal ini dikarenakan setiap wilayah memiliki karakteristik sumber daya alam yang berbeda-beda. Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan menggunakan sumber daya alam yang tersedia di wilayah tempat tinggalnya, namun apabila kebutuhan yang diperlukan tidak tersedia, maka ia akan memenuhinya dari wilayah lain yang mempunyai sumber daya alam yang ia perlukan (Kasikoen, 2011). Dengan akses jalan yang baik maka akan berpengaruh kepada kelancaran berjalannya interaksi antar wilayah dalam proses perpindahan manusia, barang, jasa maupun informasi.

Apabila suatu daerah tidak mempunyai akses infrastruktur jalan yang baik, ini akan berdampak kepada aktivitas-aktivitas masyarakatnya. Hal ini dikarenakan secara tidak langsung jalan sudah menjadi urat nadi dalam kehidupan masyarakat yang menggerakkan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Akses jalan yang buruk akan membuat daerah menjadi terisolir, hal ini dikarenakan daerah tersebut tidak dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat luar karena keterbatasan akses yang ada. Dengan keadaan yang demikian aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat akan terganggu dan tidak dapat berjalan dengan lancar. Potensi desa dengan kondisi yang demikian untuk berkembang mengalami hambatan karena lokasinya yang terisolir sehingga berdampak pada kurangnya sarana umum dan jauh dari pusat pertumbuhan dengan begitu sulit mendapatkan akses ke pasar (Syahza, 2002). Masyarakat yang tinggal di daerah dengan kondisi tersebut pun harus melakukan usaha yang lebih untuk menjangkau fasilitas-fasilitas pelayanan publik seperti untuk menuju rumah sakit, sekolah, pasar terdekat. Sehingga

masalah-masalah itu menyebabkan tingkat keterisolasian masyarakat desa dari akses pendidikan, ekonomi dan kesehatan masih relatif tinggi (Darmawan, 2018). Dengan kondisi yang demikian, mobilitas masyarakat mengalami keterhambatan. Kondisi akses jalan yang sulit akan juga berdampak kepada kesejahteraan dan taraf hidup masyarakatnya. Maka dari itu tersedianya sarana dan prasarana transportasi sangat penting guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah desa terisolir (Darmawan, 2018).

**Tabel 1.1 Data Jalan Rusak Kabupaten Kendal**

Panjang Jalan Kabupaten Kendal Beserta Kondisinya (km), 2020	
Bagus	383
Sedang	166
Rusak	115
Rusak Berat	257

Sumber : BPS Jawa Tengah

Menurut data BPS Jawa Tengah tahun 2020 kondisi jalan di Kabupaten Kendal sendiri masih banyak yang mengalami kerusakan, baik dalam kondisi rusak maupun rusak berat. Total panjang jalan dengan kondisinya yang rusak sejumlah 115 kilometer dan total panjang jalan yang berkondisi rusak berat sejumlah 257 kilometer, sehingga total keseluruhan dari jalan yang mengalami kerusakan sejumlah 372 kilometer.

**Tabel 1.2 Data Jalan Rusak Kabupaten Kendal 2021**

Panjang Jalan Kabupaten Kendal Beserta Kondisinya (km), 2021	
Bagus	670
Rusak	100

Sumber : DPUPR Kabupaten Kendal

Pembangunan infrastruktur jalan kabupaten di beberapa wilayah Kabupaten Kendal masih belum sesuai dengan rencana yang diharapkan. Proses perbaikan kerusakan jalan di Kabupaten Kendal pada tahun 2021 masih tersisa 100 Km dari keseluruhan jalan kabupaten sepanjang 770 Km. Pada tahun 2021, proses perbaikan jalan rusak yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kendal hanya hanya mampu menyelesaikan sepanjang 6 Km jalan (Prayitno, 2021). Dengan kondisi yang demikian maka baru sekitar 88 persen dari keseluruhan 770 Km panjang jalan Kabupaten Kendal yang telah dibangun dengan keadaan yang baik. Pemerintah Kabupaten Kendal masih memiliki pekerjaan rumah untuk menuntaskan 12 persen pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan rusak di Kabupaten Kendal dengan segala keterbatasan yang menyertai. Tentunya hal tersebut sudah harus menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Kendal untuk segera diselesaikan masalahnya.

Menurut RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2021-2026 infrastruktur jalan yang dibangun pemerintah berperan penting, dengan melihat fungsinya untuk kelancaran arus barang dan orang dari satu lokasi ke lokasi lain dan arus barang dari sumber-sumber produksi ke tempat-tempat pemasaran. Bupati Kabupaten Kendal, Dico M Ganinduto, memiliki harapan pada tahun 2023 semua jalan di Kabupaten Kendal yang kondisinya rusak sudah tertangani menjadi baik. Jalan tersebut termasuk jalan desa, mengingat persentase desa yang memiliki sarpras dalam kondisi baik (jalan, kantor) menurut data dari RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2021-2026 pada tahun 2020 masih sebesar 65 persen saja. Sementara kondisi jalan di Kabupaten Kendal yang kondisinya belum mendapat perbaikan

masih menyisakan 12 persen pada tahun 2021. Hal terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan ini tertuang pada Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026. Pada tahun 2022 ini Pemerintah Kabupaten Kendal memiliki arah kebijakan “Kendal Recovery” yang memprioritaskan pada pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan dan SDA yang didukung dengan penguatan layanan kesehatan dan infrastruktur yang optimal. Program dari arah kebijakan ini salah satunya memfokuskan pada peningkatan kualitas jalan kabupaten dan jalan poros desa. Akan tetapi realisasi perbaikan jalan rusak di Kabupaten Kendal mengalami hambatan lantaran anggaran yang dipergunakan untuk perbaikan jalan harus dialihkan untuk menangani pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kendal tidak memperoleh pendanaan perbaikan infrastruktur jalan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kendal 2022. Yang mana ini berarti perbaikan jalan di Kabupaten Kendal hanya menggantungkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 37 miliar. Dengan menggunakan nominal tersebut diperkirakan hanya bisa menyelesaikan perbaikan jalan sepanjang 20 kilometer, sehingga menyisakan 80 kilometer jalan yang belum diperbaiki di Kabupaten Kendal. Bisa dikatakan bahwa ini akan menjadi tugas dengan anggaran terbatas, dengan kendala tersebut diperkirakan pekerjaan perbaikan jalan belum dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu sampai dua tahun ke depan (Ma'sum, 2022). Padahal program perbaikan jalan termasuk dalam isu strategis RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2021–2026. Dengan kondisi yang demikian akan memunculkan suatu pertanyaan mengenai

keberjalanan program perbaikan jalan, akankah target perbaikan jalan rusak di Kabupaten Kendal dapat tuntas seratus persen di tahun 2023 atau tidak seperti apa yang diharapkan oleh bupati Kabupaten Kendal.

Salah satu daerah di Kabupaten Kendal yang masih mengalami ketertinggalan pembangunan infrastruktur yaitu Desa Cening, Kecamatan Singorojo. Masalah infrastruktur jalan masih menjadi masalah yang mendasar di daerah ini. Jalan yang menjadi penghubung antara Kecamatan Limbangan dan Kecamatan Singorojo sepanjang 6 Km ini sudah selama 35 tahun dalam kondisi rusak berat. Jalan di desa tersebut merupakan jalan batu sehingga kondisinya akan seperti sungai kering pada saat musim kemarau, namun di saat musim hujan jalan tersebut akan terputus aksesnya karena genangan lumpur. Di sisi lain, jalan tersebut juga menjadi akses satu-satunya untuk menuju ke Desa Cening. Kondisi yang demikian seharusnya patut untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah sejak lama, agar masyarakat Desa Cening dapat beraktivitas dengan lancar. Akan tetapi yang terjadi tidak demikian. Sudah berkali-kali pergantian kepemimpinan Bupati di Kabupaten Kendal namun kondisi jalan di Desa Cening masih menyisakan permasalahan tersendiri. Kondisi yang demikian tentunya menghambat produktivitas masyarakat di Desa Cening dalam aktivitas kesehariannya, seperti untuk berangkat bekerja, berbelanja ke pasar, mengakses fasilitas pelayanan publik, dan lain sebagainya.

Perbaikan jalan menuju desa Cening ini sejatinya sudah dimulai pada tahun 2019 di masa kepemimpinan Bupati Mirna Annisa. Jalan ini dibangun membentang dari Kecamatan Limbangan sampai Desa Cening di Kecamatan



Singorojo. Panjang jalan yang dibangun pada periode tersebut adalah 11 Km, akan tetapi pembangunan tersebut belum tuntas dan masih menyisakan jalan yang belum diperbaiki sepanjang 3,1 Km (Herlambang, 2019). Perbaikan jalan tersebut belum menyentuh Desa Cening, namun masih mencapai Desa Biting, sehingga masih menyisakan ruas jalan Desa Biting-Cening yang rusak sepanjang 3,1 Km. Sisa dari perbaikan jalan yang belum tuntas ini rencananya akan dilanjutkan dan dapat diselesaikan pada tahun 2020 dengan anggaran APBD Kabupaten Kendal dan Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi pada tahun 2020 proses perbaikan sisa ruas jalan yang masih rusak ini belum juga terealisasi dan selesai seperti apa yang telah direncanakan dan dijanjikan oleh Bupati Mirna Annisa. Dengan adanya hal tersebut pada tahun 2020 pun sisa jalan tersebut masih memiliki kondisi rusak seperti sedia kala. Perbaikan ruas jalan menuju Desa Cening ini baru dilanjutkan kembali perbaikannya pada tahun 2022 di masa kepemimpinan Dico Ganinduto. Dengan adanya masalah tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat selisih waktu yang relatif panjang dalam proses perbaikan ruas jalan menuju Desa Cening yang mulanya ditargetkan selesai pada tahun 2020 namun baru dilanjutkan kembali proses perbaikannya pada tahun 2022. Oleh karena itu terdapat penantian yang cukup lama kurang lebih selama 35 tahun bagi masyarakat Desa Cening untuk dapat melihat realisasi pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cening yang sudah lama mengalami kerusakan parah.

Pembangunan infrastruktur jalan memiliki potensi yang besar bagi kelancaran aktivitas masyarakat, namun pada realitanya pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kendal masih mengalami hambatan seperti yang

terjadi dalam pembangunan infrastruktur jalan menuju Desa Cening. Oleh sebab itu, dirasakan perlu diadakannya penelitian tentang program pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cening oleh Pemerintah Kabupaten Kendal beserta dengan dinas-dinas terkait. Hal tersebut ditujukan untuk mencari tahu lebih dalam bagaimana perkembangan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kendal terutama di Desa Cening beserta hambatan-hambatan apa saja yang mengakibatkan desa ini mengalami ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur jalan sejak lama.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana manajemen pembangunan infrastruktur jalan kabupaten di Desa Cening?
2. Mengapa terdapat hambatan dalam pembangunan infrastruktur jalan kabupaten di Desa Cening, Kabupaten Kendal dan bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan tersebut?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Melalui rumusan masalah yang disampaikan di atas, dapat diketahui bahwasanya tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana manajemen pembangunan infrastruktur jalan kabupaten di Desa Cening.
2. Untuk menjelaskan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pembangunan infrastruktur jalan kabupaten di Desa Cening, Kabupaten Kendal dan solusi dalam menyelesaikan hambatan tersebut.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **A. Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat memberi kontribusi yang positif terhadap literatur atau referensi bagi penelitian yang akan datang, khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan terkait pembangunan infrastruktur jalan di daerah. Selain itu diharapkan juga bermanfaat menjadi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang terkait.

### **B. Manfaat Praktis**

- a) Bagi Pemerintah, peneliti berharap dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam mengambil langkah kebijakan yang akan datang maupun yang akan diimplementasikan terkait dengan pembangunan infrastruktur di daerah.
- b) Bagi penulis, agar menjadi bahan pembelajaran guna mengasah dan melatih daya nalar dalam meninjau permasalahan yang terjadi di sekitar.
- c) Sebagai referensi dan informasi bagi akademisi maupun masyarakat umum yang berkepentingan dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa.

## **1.5 Penelitian Terdahulu**

- 1. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Sungai Cina Kecamatan**

**Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 oleh Rini Indriana**

Dalam riset tersebut dijelaskan bahwasanya pembangunan infrastruktur di Desa Sungai Cina, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti pada 2016 belum berjalan secara optimal. Yang mana pembangunan yang terealisasi hanya enam kegiatan dari dua puluh rencana kegiatan pembangunan infrastruktur Desa Sungai Cina. Kegiatan pembangunan tersebut tidak berjalan dan terealisasi dengan baik disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi alam, transportasi, bahan, dan pendanaan. Faktor yang paling berpengaruh pada keberlangsungan pembangunan infrastruktur di Desa Sungai Cina yaitu terkait dengan pendanaan karena terdapat ketidaksesuaian pendanaan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang tinggi sehingga hal tersebut menjadi masalah karena anggaran atau dana yang dimiliki tidak mencukupi.

**2. Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Langenharjo di Kabupaten Kendal (Studi Kasus Kerusakan Jalan di Kelurahan Langenharjo) oleh Laras Endah Cahyani, dkk**

Dalam penelitian ini menyatakan bahwa pihak atau instansi yang bertanggung jawab terhadap perawatan dan pemeliharaan jalan di Kelurahan Langenharjo, Kabupaten Kendal adalah Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) bidang Bina Marga. Segala pembiayaan pembangunan jalan di Kelurahan Langenharjo dibiayai oleh pemerintah daerah yaitu Pemerintah Daerah

Kabupaten Kendal melalui dana alokasi umum. Disamping itu masyarakat setempat juga tidak terlibat langsung di dalam pembiayaannya. Terdapat beberapa faktor yang menghambat pembangunan jalan di Kelurahan Langenharjo antara lain yaitu kurangnya sosialisasi program terhadap masyarakat, belum terdapatnya sumber daya yang memiliki pengetahuan mengenai pengawasan jalan, kewenangan pembangunan jalan yang ada di tangan DPUPR menyebabkan masyarakat harus menunggu perbaikan dari instansi tersebut apabila terdapat kerusakan jalan, prosedur yang ditempuh dalam memperbaiki jalan membutuhkan waktu yang cukup lama dan pengkajian mendalam dari DPUPR Kabupaten Kendal dengan itu perbaikan jalan membutuhkan waktu yang panjang.

### **3. Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten oleh Dinas Bina Marga, Pengairan, dan Tata Ruang (Studi Kasus di Kabupaten Paser) oleh Fadlan**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Yang mana di dalamnya menjelaskan bahwa keberhasilan pengawasan dan pengendalian kontrak Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser berdasarkan beberapa indikator tersebut dilihat dari ketepatan waktu pengerjaan dan daya serap keuangan. Berkaitan dengan tingkat keberhasilan, instansi terkait telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan infrastruktur terbaik bagi masyarakat. Namun hal ini kembali lagi ke masyarakat itu sendiri, terkait bagaimana mereka memanfaatkan fasilitas yang ada dan menjaga fasilitas yang telah

disediakan. Hal ini terjadi karena terkadang masyarakat tidak mempunyai pengetahuan yang cukup berkaitan dengan bagaimana memelihara jalan raya contohnya masih saja terdapat masyarakat yang berkendara dengan berlebihan dalam muatan. Selanjutnya terkait kendala yang dialami oleh Dinas Bina Marga, Pengairan, dan Tata Ruang Kabupaten Paser dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan infrastruktur jalan ialah masalah pembebasan lahan, cuaca yang tidak mendukung, dan sumber daya manusia yang kurang memadai dalam pengerjaan proyek.

#### **4. Pengawasan Pemeliharaan Jalan oleh Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang oleh Ulvi Fandri**

Di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pemeliharaan jalan di Tanjung Pinang diawasi oleh pihak Dinas Bina Marga Tanjung Pinang, yang mana ini merupakan bentuk kontrol dari pemerintah terhadap permasalahan sarana dan prasarana jalan. Tahap pemeliharaan jalan tersebut dibagi menjadi tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Namun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan adanya beberapa hambatan yang menyertai. Hal tersebut antara lain yaitu kurangnya jumlah sumber daya manusia atau personil di lapangan, keterampilan SDM yang kurang memadai, kurang aktifnya pihak-pihak yang mempunyai kewenangan terhadap status jalannya, cuaca yang tidak bersahabat, dan anggaran yang terbatas.

## **1.6 Kerangka Teori**

### **a. Pembangunan Infrastruktur**

Arti dari infrastruktur merujuk pada Grigg (1988) adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, drainase, pengairan, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial ataupun kebutuhan ekonomi. Infrastruktur tersebut apabila dikaitkan menjadi satu sistem maka akan menjadi bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Grigg (1988) juga mengelompokkan beberapa kategori besar infrastruktur, antara lain yaitu :

1. Kelompok jalan (jalan, jalan raya, jembatan);
2. Kelompok pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara);
3. Kelompok air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk jalan air);
4. Kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat);
5. Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar;
6. Kelompok produksi dan distribusi energi (listrik dan gas).

Infrastruktur menurut Larimer (dalam Suriani dan Keusuma, 2015) diartikan sebagai rancangan kerja atau pondasi yang mendasari pada pelayanan pokok, fasilitas, dan institusi yang mana hal tersebut bergantung kepada pertumbuhan dan pembangunan dari suatu wilayah, komunitas, dan sistem. Dalam *The Routledge Dictionary of Economics* (1995) mendefinisikan bahwa infrastruktur adalah pelayanan utama dari suatu negara yang mendukung aktivitas

ekonomi dan aktivitas masyarakat sehingga bisa berjalan melalui penyediaan transportasi ataupun fasilitas pendukung yang lain.

Pembangunan menjadi hal yang sangat krusial dalam meningkatkan kemajuan di suatu daerah, pembangunan disini dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sebesar-besarnya pada masyarakat (Rolos & Sambiran, 2018). Pembangunan akan berjalan dengan tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan dimanfaatkan hasilnya jika pembangunan yang dilakukan benar-benar memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu hal yang penting untuk dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan bahwa infrastruktur menjadi suatu penentu utama berlangsungnya kegiatan pembangunan, termasuk untuk mencapai target pembangunan kualitatif maupun kuantitatif (Marzuki, 2007). Dalam jangka pendek pembangunan infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja di dalam sektor konstruksi, pada jangka menengah dan panjang akan mempengaruhi peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi terkait. Dengan itu pembangunan infrastruktur bisa dikatakan menjadi langkah untuk merangsang peningkatan output ekonomi, penyelesaian masalah kemiskinan, peningkatan kualitas masyarakat, serta peningkatan kelancaran perpindahan barang dan jasa (Kusuma, 2019).

Basri (2002) menjelaskan pengaruh penyediaan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi, hal tersebut yaitu : (1) mempercepat penyediaan barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, (2) dengan adanya infrastruktur yang



baik maka akan memungkinkan ketersediaan barang yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih murah, (3) kondisi infrastruktur yang baik dapat melancarkan akses transportasi yang nantinya dapat merangsang stabilisasi dan mengurangi ketimpangan harga antar daerah, (4) infrastruktur yang melancarkan arus transportasi mengakibatkan hasil produksi daerah dapat diangkut dan dijual ke pasaran luas.

Infrastruktur sendiri menurut Familoni (2004) dibagi menjadi 2 kelompok yaitu terdiri dari infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Untuk infrastruktur ekonomi ini memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Hal ini antara lain terdiri dari utilitas publik seperti tenaga listrik, air bersih, telekomunikasi, pekerjaan umum, jalan, kanal, proyek transportasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya infrastruktur sosial sendiri terdiri dari infrastruktur pendidikan dan kesehatan.

Infrastruktur ini menjadi aset yang penting bagi pemerintah yang dibangun untuk upaya memberi pelayanan kepada masyarakat (Kusuma, 2019). Hal tersebut terdiri dari infrastruktur pusat dan infrastruktur daerah. Infrastruktur pusat sendiri merupakan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah pusat dalam pelayanan kebutuhan masyarakat secara lingkup nasional. Sedangkan infrastruktur daerah merupakan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah daerah itu sendiri untuk melayani kebutuhan masyarakat di daerahnya. Pada dasarnya, infrastruktur menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Kusuma, 2019). Hal tersebut dapat dilakukan melalui alokasi dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah juga memiliki fungsi pembangunan. Dengan itu pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan. Hal ini berarti pemerintah harus bisa berperan sebagai pelaku pembangunan di daerahnya. Pembangunan disini tidak hanya terkait pembangunan fisik namun juga pembangunan yang sifatnya non fisik.

#### **b. Manajemen Pembangunan**

Siagian (2005) mendefinisikan manajemen pembangunan merupakan rangkaian atau upaya pertumbuhan yang direncanakan dan upaya perubahan yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka menuju modernitas dalam pembangunan negara. Sedangkan Tjokroamidjojo (1995) mengemukakan bahwa manajemen pembangunan merupakan proses kontrol dari pemerintah terhadap bisnis (administrasi) dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang direncanakan ke arah yang dianggap lebih maju dan lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa.

Manajemen pembangunan di Indonesia sendiri berlandaskan dan berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Strategi yang ditempuh dalam manajemen proses pembangunan tersebut mengusahakan secara serasi hal-hal yang berkaitan dengan trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas nasional (Kato & dkk, 2021). Hal tersebut pada akhirnya bertujuan untuk mendukung ketahanan nasional. Konsep manajemen

pembangunan ini merupakan sudut pandang lain dari konsep administrasi pembangunan, hal ini berdasar kepada peran administrasi dalam mewujudkan pembangunan (Esman, 1991). Oleh karena itu masalah administrasi pembangunan juga terkait dengan masalah manajemen pembangunan.

Manajemen pembangunan seharusnya mampu untuk mengoptimalkan modal pembangunan di suatu wilayah dan mengelola hal tersebut guna mewujudkan kesejahteraan ke arah yang lebih baik (Saksono, 2019). Namun belum keseluruhan pemangku kepentingan dalam pembangunan mempunyai pemahaman dan kapabilitas dalam mengelola modal pembangunan yang ada di daerahnya. Dengan begitu terkadang pengelolaan perencanaan pembangunan daerah masih berjalan secara konvensional dan belum beracuan kepada hasil penelitian, pengembangan, inovasi, dan desain.

Dengan adanya pembangunan diharapkan membawa perubahan pada arah yang lebih baik, tetapi hal tersebut tentunya juga membutuhkan sebuah perencanaan yang matang agar tujuan yang ingin dituju dapat tercapai. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum maka perencanaan pembangunan yang nantinya akan direalisasikan melalui proses pembangunan sangatlah diperlukan.

Dalam kaitannya mengenai manajemen pembangunan daerah, hal mendasar yang masih menjadi masalah dan belum teratasi hingga saat ini yaitu berkaitan dengan keterbatasan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Kato & dkk, 2021). Terdapat suatu ketergantungan pemerintah daerah terhadap kucuran dana yang berasal dari pemerintah pusat.

Beberapa aparat pemerintah daerah masih belum siap untuk menghadapi otonomi daerah, yang mana hal tersebut berimplikasi kepada daerah-daerah yang masih kesulitan untuk mengumpulkan sumber pembiayaan yang otonom. Terkadang hal tersebut diperparah lagi dengan kondisi alokasi dana pembangunan daerah yang belum tepat sasaran dan tidak sesuai kebutuhan dari masyarakat daerah dalam meningkatkan kesejahteraan.

Melalui pembangunan daerah akan menjadi suatu bagian dari pembangunan nasional yang memiliki tujuan agar seluruh daerah mampu melaksanakan pembangunan dengan merata dan proporsional, sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut (Budiman, 2021). Soekartawi dalam Budiman (2021) mengemukakan jika pembangunan wilayah dilakukan dengan pengelolaan yang baik (*well managed*) diharapkan berpotensi untuk mendorong kemandirian daerah agar dapat tumbuh dan berkembang di atas kekuatan sendiri. Dengan begitu dapat kita ketahui bahwa manajemen pembangunan wilayah ini memiliki kaitan erat dengan peningkatan kinerja wilayah dan upaya mewujudkan pembangunan antar wilayah yang seimbang dan dilakukan secara berkeadilan.

Menurut George R. Terry (2016) mengemukakan bahwa fungsi-fungsi manajemen ini terdiri dari: proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) serta pengawasan (*controlling*). Dengan begitu dalam aktivitas tentu diawali dengan sebuah perencanaan, termasuk dalam manajemen pembangunan. Hal ini dikarenakan melalui perencanaan akan menentukan tindakan apa saja yang akan dijalankan selanjutnya. Dalam manajemen fungsi perencanaan merupakan hal yang paling mendasar, mengingat

fungsi-fungsi manajemen yang lainnya sudah tentu dipikirkan dengan cermat terlebih dahulu melalui proses perencanaan yang dilakukan secara komprehensif. Ini berarti bagaimana fungsi-fungsi manajemen tersebut berjalan dengan baik atau tidak tergantung kepada ketepatan perencanaan yang dirumuskan sebelumnya.

Apabila dikaitkan dengan manajemen pembangunan, dalam skala nasional maupun skala daerah, perencanaan ini mempunyai peran yang sangat vital karena berhubungan dengan fungsi koordinasi, pengawasan, dan pengendalian atas keberjalanan program-program pembangunan (Budiman, 2021). Melalui tahap perencanaan ini dapat menentukan prosedur, sasaran, dan program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan di masa mendatang. Timbulnya masalah-masalah krusial dalam pembangunan daerah secara manajerial disebabkan oleh adanya kelemahan pada fungsi perencanaan, sehingga menimbulkan masalah baru seperti lambannya proses pembangunan, tidak meratanya hasil pembangunan, terbengkalainya proyek atau aktivitas pembangunan, rendahnya capaian hasil dan lain sebagainya (Budiman, 2021). Sehingga apabila fungsi perencanaan dalam manajemen pembangunan tidak dilaksanakan dengan baik maka akan mengakibatkan kompleksitas masalah baru yang muncul.

Adanya masalah ketidakmerataan pembangunan daerah yang tidak dilakukan secara proporsional setidaknya mendorong para *stakeholders* untuk berdiskusi dan menerima aspirasi terkait penyelesaian hal tersebut. Skema yang digunakan dalam implementasi pembangunan daerah di masa otonomi daerah ini semakin menjadikan potensi, aspirasi, dan kekhasan daerah sebagai bahan

pertimbangan (Budiman, 2021). Rencana Strategis Daerah harus sejalan serta mengacu pada Rencana Strategis Nasional. Dengan begitu, selama tidak melenceng dari Rencana Strategi Nasional, maka pendekatan yang diterapkan daerah dalam melakukan pembangunan dapat berbeda-beda menyesuaikan dengan karakteristik demografis, geografis, dan keadaan sosial budaya di daerah masing-masing. Ini dilaksanakan untuk memaksimalkan potensi yang terdapat di daerah, guna mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerahnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

### **c. Evaluasi Program**

Wahab dalam Adzhani (2019) menjelaskan bahwa program adalah suatu kegiatan pemerintah yang mempunyai batasan yang cukup jelas dan relatif khusus. Selain itu program juga menjadi suatu realisasi dari kebijakan yang prosesnya berkesinambungan dan melibatkan orang banyak (Adzhani, 2019). Program dapat menjadi turunan dari kebijakan yang dirumuskan pemerintah guna menggapai tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi menjadi suatu kegiatan dalam menilai kinerja dalam suatu kebijakan atau program. Dalam konsep manajerial evaluasi dijadikan suatu usaha yang dilakukan secara objektif untuk menilai hasil pencapaian dari hal yang sebelumnya telah ditetapkan (Abdoellah dan Rusfiana, 2016). Evaluasi juga didefinisikan sebagai kegiatan dalam menilai program atau kebijakan yang sudah disusun dan dilaksanakan sebagai bentuk perbaikan kepada program atau kebijakan ke depannya (Yofita & Jumiati, 2019).

Muhadjir dalam Widodo (2007) menyebutkan bahwasanya evaluasi mempunyai manfaat untuk memantau proses pelaksanaan kebijakan atau program apakah telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Setelah diimplementasikannya kebijakan atau program, maka kebijakan atau program tersebut perlu dievaluasi. Tahapan ini menjadi hal yang esensial dan tidak bisa terpisahkan. Melalui evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan atau program dilaksanakan seperti tujuan-tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan. Di samping itu, melalui adanya evaluasi juga dapat menjadi acuan untuk pengambilan keputusan di masa mendatang. Evaluasi menjadi proses yang diterapkan sebagai alat pengukuran untuk melakukan perbandingan antara hasil pekerjaan yang telah dicapai secara *real* dengan hasil yang seharusnya dituju (Siagian, 2005).

Evaluasi program atau kebijakan ini berfungsi untuk mencari informasi dan data terhadap pelaksanaan suatu program untuk berikutnya bisa diambil keputusan apakah program yang telah dilaksanakan layak untuk dilanjutkan, ditunda, ataupun gagal sehingga terpaksa pelaksanaannya diberhentikan (Sutisna, 2005). Dengan begitu dapat diketahui bahwa evaluasi program ini menjadi suatu kegiatan untuk menilai program yang hendak, sedang, atau telah dilaksanakan untuk dicari tahu seberapa besar program dalam mencapai tujuan atau target yang sudah ditentukan. Dengan begitu dapat dijadikan bahan masukan dalam keberlangsungan program di masa mendatang. Melalui evaluasi juga dapat diketahui kelebihan serta kekurangan dari program tersebut.

Terdapat suatu indikator tertentu dalam mengukur evaluasi kebijakan atau program. Indikator sendiri menjadi suatu hal yang dapat menjadi petunjuk atau keterangan. Bridgman dan Davis (2000) mengemukakan pengukuran evaluasi kebijakan atau program mengacu kepada empat indikator secara umum yaitu terkait dengan indikator *input*, indikator *process*, indikator *outputs*, dan indikator *outcomes*.

### **1.7 Operasionalisasi Konsep**

Manajemen pembangunan merupakan rangkaian atau upaya untuk pertumbuhan yang direncanakan dan diupayakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka menuju modernitas dalam pembangunan negara (Siagian, 2005). Melalui manajemen pembangunan dilakukan untuk mengoptimalkan modal pembangunan di suatu wilayah dan mengelola hal tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dalam hal pembangunan ini salah satunya dilakukan di daerah karena pembangunan daerah menjadi bagian dari pembangunan nasional.

Terkait dengan fungsi-fungsi manajemen yang dirumuskan oleh George R. Terry (1958) dalam bukunya *Principles of Management* membagi fungsi manajemen dalam beberapa tahapan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)

George R. Terry dalam *Principles of Management* (Sukarna, 2011) menjelaskan bahwa perencanaan merupakan pemilihan fakta dan penghubung fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-



perkiraan atau asumsi untuk masa yang akan datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target atau hasil yang ingin dicapai. Perencanaan menjadi tahapan awal yang perlu dilakukan dalam suatu organisasi ataupun bisnis dalam menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dicapai di kemudian hari, tentunya ini juga berlaku dalam proses pembangunan. Penentuan segala hal yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas inilah yang disebut sebagai bentuk perencanaan.

## 2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan tahap penentuan, pengelompokan, dan penyusunan berbagai macam kegiatan yang diperlukan untuk menggapai tujuan. Di samping itu pada tahapan ini juga dilakukan pengelompokan orang dalam suatu organisasi yang dapat digerakkan sesuai aturan yang sesuai dengan rencana yang hendak dicapai dan menjadi tujuan. Tujuan dari pengelompokan ini yaitu agar suatu organisasi dapat digerakan sebagai satu kesatuan yang sesuai dengan rencana yang telah dibuat sesuai dengan pembagian tugas masing-masing individu.

## 3. Pelaksanaan (*Actuating*)

George R. Terry dalam Sukarna (2011) menjelaskan bahwa pelaksanaan merupakan tahap yang mendorong seluruh anggota kelompok agar berusaha dengan keras untuk menggapai tujuan yang serasi dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian dari pimpinan. Tahap ini merupakan langkah yang penting dalam proses manajemen karena apabila

suatu organisasi telah memiliki perencanaan yang matang dan baik serta memiliki struktur organisasi yang baik dengan tanpa adanya pelaksanaan maka tujuan yang telah dirumuskan tidak akan dapat dicapai. Tahap pelaksanaan ini merupakan upaya menjadikan perencanaan yang telah dirumuskan menjadi kenyataan melalui berbagai macam kegiatan sesuai dengan tugas yang diemban.

#### 4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan sendiri menjadi tahapan yang memiliki peran penting untuk melihat apakah proses manajemen berlangsung dengan baik dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan atau sebaliknya. Langkah yang diambil dalam hal ini yaitu dengan menilai, mengevaluasi, dan mengoreksi setiap langkah dalam perencanaan berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. George R. Terry dalam Sukarna (2011) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan suatu proses penentuan apa yang harus dicapai melalui standar, menilai pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan dapat sesuai dengan rencana.

Dalam penelitian terkait evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten di Desa Cening, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, penulis menggunakan beberapa indikator menurut Bridgman dan Davis (2000) antara lain adalah sebagai berikut:

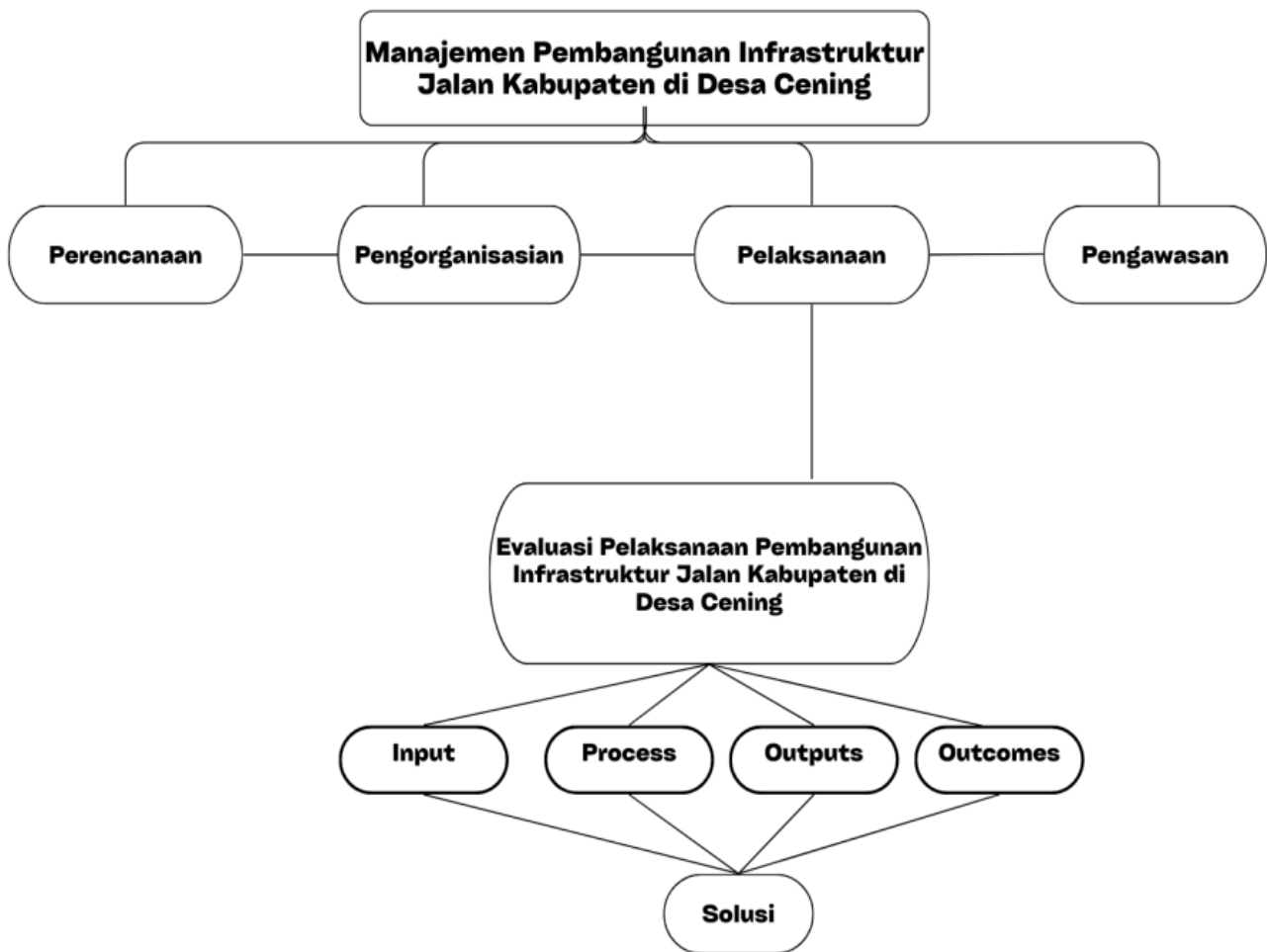
1. Indikator *input* memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan

program. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial, atau infrastruktur pendukung lainnya.

2. Indikator *proses* memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan program tertentu.
3. Indikator *outputs* (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari program atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa panjang jalan yang berhasil dibangun.
4. Indikator *outcomes* (dampak) memfokuskan kepada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena program tersebut.

### **1.8 Kerangka Pemikiran**

Sugiyono (2018) menjelaskan bahwasanya kerangka pemikiran merupakan acuan alur penelitian atau alur berpikir yang mana akan menjadi landasan berpikir oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian terhadap objek yang diamati. Ini menjadi model konseptual terkait tentang hubungan teori dan beberapa faktor yang sudah diidentifikasi menjadi suatu *problem* yang penting. Melalui kerangka pemikiran ini dapat memberi suatu ilustrasi singkat tentang bagaimana tahap-tahap penelitian dari tahapan awal hingga akhir untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka pemikiran yang dikembangkan di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



## 1.9 Metode Penelitian

### a. Desain Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Merujuk pada Creswell dalam (dalam Kusumastuti & Khoiron, 2019) menjelaskan bahwasanya penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang ditujukan untuk menjelajahi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari permasalahan sosial. Selanjutnya, pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang mana penelitian ini mengarah untuk

memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Hardani, 2020).

Melalui penelitian ini peneliti berusaha untuk menggambarkan ataupun mendeskripsikan manajemen pembangunan dan permasalahan yang menjadi penyebab faktor penghambat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cening, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Selain itu di dalam penelitian ini peneliti juga berusaha untuk menjelaskan bagaimana solusi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kendal untuk mengatasi mengatasi hambatan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cening, Kabupaten Kendal.

#### **b. Subjek dan Obyek Penelitian**

Subyek penelitian di dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Desa Cening dan DPUPR Kabupaten Kendal. Pada penelitian ini ketiga subyek penelitian memiliki peran penting sebagai informan dalam pencarian data terkait dengan penelitian ini.

Objek penelitian yang dipilih dalam riset ini yang pertama yaitu Pemerintah Desa Cening sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah Desa Cening sendiri beralamatkan di Jalan Ky. Tanjung No. 1, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Dipilihnya Pemerintah Desa Cening sebagai objek penelitian karena terdapat masalah pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pemerintahan desa tersebut, adapun masalah yang perlu dikaji lebih lanjut yaitu mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pembangunan

infrastruktur jalan di Desa Cening, Kabupaten Kendal. Objek penelitian yang kedua yaitu DPUPR Kabupaten Kendal yang memiliki tugas dalam perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan. DPUPR Kabupaten Kendal sendiri terletak di Jl. Laut No.25, RT.02/RW.5, Ngilir, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal. DPUPR dipilih sebagai objek penelitian karena untuk mendalami dan mengkaji terkait solusi untuk mengatasi hambatan dalam pembangunan infrastruktur jalan kabupaten di Desa Cening, Kabupaten Kendal.

### **c. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari :

#### **i. Data Primer**

Data primer merupakan jenis data yang didapat dari sumber langsung yaitu informan pada pengumpul data dalam kaitan ini yaitu peneliti. Untuk memperoleh data primer ini terdapat beberapa cara yang biasa ditempuh yaitu melalui hasil wawancara dengan narasumber dan hasil observasi yang dilaksanakan oleh peneliti secara langsung tanpa melalui perantara.

#### **ii. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan jenis data yang didapatkan secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka (Hardani, 2020). Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa jurnal-jurnal, dokumen, laporan, artikel, data ataupun bahan bacaan lainnya yang masih relevan dengan topik penelitian.

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain adalah sebagai berikut :

i. Wawancara

Wawancara pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas percakapan antara dua atau lebih pihak yang dilakukan antara pewawancara dan narasumber. Sedangkan menurut Moelong (2010) wawancara merupakan sebuah percakapan yang memiliki tujuan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti dan narasumber berhadapan secara langsung untuk memperoleh informasi secara lisan yang bertujuan guna mendapat data yang dapat menjelaskan suatu masalah penelitian. Wawancara dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pihak DPUPR Kabupaten Kendal dan Pemerintah Desa Cening sebagai objek penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait dengan permasalahan faktor-faktor yang menjadi penghambat pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cening serta tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

ii. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan terhadap subjek dan objek penelitian. Observasi pada penelitian ini akan dilakukan dengan mengamati terkait bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pegawai DPUPR Kabupaten Kendal dalam mengatasi permasalahan pembangunan jalan di Desa Cening, sikap pegawai DPUPR Kabupaten Kendal dalam menanggapi

keluhan masyarakat Desa Cening terkait rusaknya akses jalan disana, serta kegiatan lain yang dilakukan oleh pihak DPUPR Kabupaten Kendal dalam melakukan pembangunan jalan.

iii. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mencatat data-data yang sebelumnya sudah tersedia. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti harus bisa memilih dan memilah data-data yang masih relevan dengan topik penelitian yang diangkat. Data-data tersebut diperoleh dari laporan ataupun dokumen lainnya. Di dalam penelitian ini akan dilakukan dengan memahami dan mencatat dokumen-dokumen seperti Laporan Kinerja DPUPR Kabupaten Kendal, Laporan mengenai Pembangunan Jalan di Kabupaten Kendal, Data keluhan masyarakat terkait kondisi jalan di Kabupaten Kendal, dan data terkait organisasi dan prosedur kerja DPU-PR Kabupaten Kendal.

**e. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang diadopsi oleh peneliti di dalam melakukan riset ini yaitu dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif menurut Sugiyono (2018) merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dari sini dapat kita



pahami jika analisis data pada penelitian kualitatif ini ditujukan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang menjadi topik penelitian.

Di dalam penelitian ini memakai model analisis data yang dirumuskan oleh Miles dan Huberman yang dibagi dalam 3 alur, yaitu : (1) reduksi data (data reduction); (2) penyajian data (data display); dan (3) penarikan simpulan (Hardani, 2020).

i. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah tahapan dalam teknik analisis data yang ditujukan untuk memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang didapatkan di lapangan kepada hal-hal yang dianggap penting. Cara ini berguna untuk lebih menyederhanakan dan mentransformasikan data kualitatif ke dalam tulisan melalui seleksi yang ketat. Di dalam riset ini peneliti akan melakukan reduksi data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data primer dan data sekunder.

ii. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksudkan disini merupakan kumpulan informasi yang dimungkinkan dapat untuk ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Di dalam penelitian kualitatif penyajian data pada umumnya berbentuk teks yang sifatnya naratif. Penyajian data ditujukan agar data penelitian dapat dengan mudah dimengerti sehingga memudahkan peneliti dan pembaca. Di dalam penelitian ini peneliti akan berusaha untuk melakukan penyajian data yang berkaitan dengan manajemen pembangunan faktor penyebab terhambatnya pembangunan infrastruktur

jalan di Desa Cening, Kabupaten Kendal, serta penyajian data terkait solusi dari pihak DPUPR Kabupaten Kendal untuk mengatasi hambatan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cening.

iii. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahapan ini menjadi tahap terakhir dari analisis data. Dalam melakukan penarikan kesimpulan harus didukung dengan adanya bukti-bukti atau data-data yang bersifat valid. Kesimpulan ini akan menjadi intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir berdasar pada penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, biasanya juga ditambah dengan pendapat pribadi peneliti. Dalam penarikan kesimpulan harus sesuai atau relevan dengan tujuan dan fokus penelitian. Di dalam penelitian ini peneliti akan berupaya untuk menarik kesimpulan dari temuan yang sudah didapat dalam penelitian terkait dengan manajemen pembangunan dan faktor penyebab terhambatnya pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cening, Kabupaten Kendal, serta penyajian data terkait solusi dari pihak DPUPR Kabupaten Kendal untuk mengatasi hambatan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cening.